



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 15259-15271

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Parepare

Fitriyani Syukri, Sofyan, Rahmad Dani, Pajrin

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare

fitriyanisyukri19@gmail.com, prians5674@gmail.com, rahmaddani020304@gmail.com, ffajrin353@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas perencanaan pembangunan daerah serta keterkaitannya dengan kesejahteraan masyarakat di Kota Parepare. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui analisis dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta studi dokumentasi dan observasi lapangan. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola hubungan antara perencanaan, implementasi, dan capaian pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas dokumen RPJMD secara struktural telah memenuhi ketentuan formal, namun masih lemah dalam perumusan indikator kinerja yang terukur serta konsistensi antara tujuan, sasaran, dan program. Proses penyusunan RPJMD telah melibatkan berbagai aktor, tetapi partisipasi masyarakat masih bersifat formal dan belum substantif. Selain itu, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi akibat keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dan kapasitas kelembagaan. Dari sisi outcome, pembangunan daerah menunjukkan tren positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan penurunan tingkat kemiskinan. Namun, manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata, terutama dalam akses terhadap peluang ekonomi dan layanan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas perencanaan pembangunan memiliki peran penting, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, konsistensi implementasi, dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Temuan ini berkontribusi pada penguatan literatur pembangunan daerah dengan menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan berbasis bukti.

Kata kunci: Perencanaan Pembangunan Daerah, RPJMD, Kesejahteraan Masyarakat, Kebijakan Publik, Pembangunan Inklusif

1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata. Dalam perspektif teori pembangunan modern, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kelembagaan, dan keberlanjutan lingkungan (OECD, 2019; World Bank, 2020; UNDP, 2022). Pendekatan ini menegaskan bahwa pembangunan yang berkualitas harus mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan inklusif yang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara luas, termasuk kelompok rentan dan wilayah tertinggal (UNDP, 2022; Asian Development Bank, 2022). Selain itu, literatur terbaru juga menekankan pentingnya pendekatan *place-based development*, yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik lokal suatu daerah untuk meningkatkan efektivitas intervensi kebijakan (Barca et al., 2019).

Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, pemberlakuan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif (Bappenas, 2021; OECD, 2021). Desentralisasi juga membuka ruang inovasi kebijakan di tingkat lokal serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat. Namun demikian, desentralisasi juga menghadirkan tantangan berupa perbedaan kapasitas kelembagaan antar daerah, yang berdampak pada kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan (Rodríguez-Pose & Wilkie,

2019; World Bank, 2021). Studi terbaru menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas institusional yang rendah cenderung mengalami kesenjangan dalam kualitas pelayanan publik dan efektivitas kebijakan (OECD, 2021).

Perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen utama dalam mengarahkan pembangunan agar berjalan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara perencanaan jangka panjang (RPJPD) dan perencanaan tahunan (RKPD). RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta program pembangunan daerah yang dirancang untuk periode lima tahun dan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Selain itu, RPJMD juga berfungsi sebagai instrumen integrasi kebijakan lintas sektor dan sebagai alat pengendalian serta evaluasi kinerja pemerintah daerah (Bappenas, 2021; OECD, 2020). Dalam praktiknya, kualitas RPJMD sangat menentukan arah pembangunan daerah, terutama dalam memastikan konsistensi antara perencanaan strategis dan implementasi program di lapangan.

Efektivitas perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas data, kapasitas analisis, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan pembangunan. Perencanaan yang berbasis data dan *evidence-based policy* terbukti mampu meningkatkan akurasi penentuan prioritas pembangunan serta efisiensi penggunaan anggaran (World Bank, 2020; OECD, 2019). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem data terpadu dalam perencanaan publik semakin menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (United Nations, 2021). Sebaliknya, perencanaan yang lemah sering kali menyebabkan ketidaksesuaian antara program yang direncanakan dan kebutuhan masyarakat, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pembangunan (OECD, 2021).

Keberhasilan pembangunan daerah pada akhirnya tercermin dari capaian indikator kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (World Bank, 2023; UNDP, 2023). Studi empiris menunjukkan bahwa daerah dengan perencanaan pembangunan yang baik cenderung memiliki kinerja ekonomi yang lebih stabil, tingkat kemiskinan yang lebih rendah, serta kualitas hidup masyarakat yang lebih tinggi. Namun demikian, pembangunan juga sering menghadapi tantangan berupa ketimpangan antar wilayah, baik secara geografis maupun sosial-ekonomi, yang dapat menghambat pencapaian kesejahteraan secara merata (Asian Development Bank, 2022). Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial.

Kota Parepare sebagai salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan Ajatappareng. Letak geografisnya yang relatif kecil tidak mengurangi dinamika ekonomi yang berkembang di kota ini. Aktivitas perdagangan, jasa, pendidikan, serta sektor pelayanan publik menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Kondisi ini menuntut adanya perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal secara maksimal. Selain itu, posisi Parepare sebagai kota penghubung antar wilayah juga menuntut adanya perencanaan yang mampu mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi regional.

Namun demikian, seperti daerah lainnya, Kota Parepare juga menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti keterbatasan sumber daya, kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur, serta tuntutan peningkatan pelayanan publik. Selain itu, perubahan dinamika ekonomi global, perkembangan teknologi, serta kebijakan nasional turut memengaruhi arah dan efektivitas pembangunan daerah (World Bank, 2023; OECD, 2021). Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya ketidakpastian global, seperti perubahan iklim dan transformasi digital, yang menuntut perencanaan pembangunan yang lebih adaptif dan responsif (United Nations, 2021). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan tidak hanya harus mampu menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga harus adaptif terhadap perubahan di masa depan.

Berbagai studi dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi antar sektor, serta partisipasi masyarakat. Rodríguez-Pose dan Wilkie (2019) menekankan pentingnya institusi yang kuat dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah. Sementara itu, OECD (2021) menyoroti perlunya integrasi kebijakan lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. World Bank (2020) juga menegaskan bahwa keselarasan antara perencanaan dan implementasi merupakan faktor kunci dalam mencapai hasil pembangunan yang optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat yang substantif terbukti dapat meningkatkan legitimasi dan kualitas kebijakan publik (UNDP, 2022).

Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik mengkaji hubungan antara perencanaan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat pada tingkat lokal, khususnya di Kota Parepare, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada skala nasional atau regional secara umum, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas perencanaan pembangunan di tingkat kota. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis data lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis perencanaan pembangunan daerah di Kota Parepare secara lebih mendalam dengan mengaitkan antara dokumen perencanaan, implementasi kebijakan, serta capaian indikator kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian pembangunan daerah serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

2.1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis dan studi kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis kualitas perencanaan pembangunan daerah serta keterkaitannya dengan kesejahteraan masyarakat melalui kajian terhadap dokumen RPJMD Kota Parepare.

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengkaji secara mendalam proses perencanaan, aktor yang terlibat, serta dinamika implementasi kebijakan dalam konteks lokal. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman makna, proses, dan perspektif aktor dalam fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif (Creswell & Creswell, 2022; Malahati et al., 2023).

Desain deskriptif-analitis digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai kondisi perencanaan pembangunan sekaligus menganalisis hubungan antara perencanaan dan capaian kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menginterpretasikan pola, hubungan, serta implikasi kebijakan berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan (Imanina, 2024).

Selain itu, penelitian ini menggunakan desain studi kasus karena memungkinkan eksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata (*real-life context*). Studi kasus efektif digunakan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dengan mempertimbangkan faktor kontekstual, serta memberikan pemahaman yang holistik terhadap dinamika proses dan interaksi antar aktor (Siregar & Murhayati, 2024; Septiana et al., 2024).

Pendekatan ini juga memungkinkan penggunaan berbagai sumber data secara simultan, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek penelitian. Dengan demikian, kombinasi pendekatan kualitatif, desain deskriptif-analitis, dan studi kasus memberikan kerangka metodologis yang kuat untuk menganalisis kualitas perencanaan pembangunan daerah dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga aspek utama yang saling berkaitan dalam kerangka analisis perencanaan pembangunan daerah.

- a. Kualitas dokumen RPJMD Kota Parepare, yang dianalisis melalui beberapa indikator kunci, yaitu kejelasan dan konsistensi visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini juga menilai keselarasan antara arah kebijakan, strategi pembangunan, serta program dan kegiatan yang dirumuskan. Evaluasi dilakukan dengan melihat apakah dokumen RPJMD telah memenuhi prinsip perencanaan yang baik, seperti berbasis data (*evidence-based*), terukur melalui indikator kinerja yang jelas, serta memiliki keterkaitan logis antara input, output, dan outcome pembangunan.
- b. Proses penyusunan RPJMD, yang mencakup tingkat partisipasi pemangku kepentingan dan kualitas integrasi lintas sektor. Analisis difokuskan pada bagaimana keterlibatan aktor, seperti pemerintah daerah, DPRD, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat, berlangsung dalam tahapan perencanaan, termasuk dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan efektif dalam menyusun program yang terintegrasi dan tidak sektoral.

- c. Kesesuaian antara perencanaan dan implementasi, khususnya dalam pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat. Fokus ini menilai sejauh mana program dan kebijakan yang telah direncanakan dalam RPJMD dapat diimplementasikan secara konsisten di lapangan, serta bagaimana dampaknya terhadap indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan akses layanan dasar. Analisis juga mencakup identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara rencana dan realisasi, seperti keterbatasan anggaran, kapasitas kelembagaan, serta dinamika kebijakan.

Untuk mempertajam analisis, penelitian ini menggunakan perspektif analisis kebijakan publik, khususnya model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Howlett dan Mukherjee (2018), yang menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan (policy design), pelaksanaan (policy implementation), dan hasil kebijakan (policy outcomes). Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menilai kualitas dokumen perencanaan secara normatif, tetapi juga mengkaji efektivitasnya dalam praktik serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara nyata.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan:

- a. Data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, seperti Bappeda Kota Parepare, OPD terkait, serta masyarakat penerima manfaat pembangunan.
- b. Data sekunder, berupa dokumen RPJMD, RKPD, laporan kinerja pemerintah daerah, serta data indikator kesejahteraan masyarakat dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait.

Penggunaan dua jenis data ini bertujuan untuk meningkatkan validitas melalui triangulasi (Creswell & Creswell, 2022). Secara metodologis, kombinasi data primer dan sekunder memungkinkan peneliti tidak hanya memahami fenomena dari perspektif aktor (*emic perspective*), tetapi juga memverifikasi temuan dengan data objektif (*etic perspective*).

Selain itu, data primer memberikan informasi kontekstual mengenai proses, dinamika, dan kendala dalam perencanaan pembangunan, sedangkan data sekunder berfungsi sebagai dasar analisis kebijakan dan pengukuran capaian pembangunan. Dengan demikian, integrasi kedua jenis data ini memperkuat kedalaman analisis sekaligus meningkatkan reliabilitas temuan penelitian.

2.4. Teknik Penentuan Informan

Informan dipilih menggunakan *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria seperti keterlibatan dalam penyusunan RPJMD atau implementasi program pembangunan. Selain itu, digunakan *snowball sampling* untuk memperoleh informan tambahan yang relevan. Teknik ini efektif dalam penelitian kualitatif untuk menggali informasi yang mendalam dan kontekstual (Etikan & Bala, 2017).

Penggunaan *purposive sampling* memungkinkan peneliti memilih informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan peran strategis terhadap isu yang diteliti, sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan relevan. Sementara itu, *snowball sampling* digunakan untuk mengidentifikasi aktor-aktor kunci lain yang mungkin tidak terjangkau pada tahap awal penelitian, terutama dalam konteks jaringan kebijakan yang kompleks.

Pendekatan ini juga membantu menangkap variasi perspektif, baik dari aktor pemerintah maupun masyarakat, sehingga analisis tidak bersifat bias institusional. Dengan demikian, pemilihan informan tidak hanya mempertimbangkan jumlah, tetapi juga kualitas informasi yang dapat diberikan.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Wawancara mendalam, untuk menggali proses perencanaan dan implementasi RPJMD.
- b. Studi dokumentasi, untuk menganalisis isi RPJMD dan dokumen pendukung lainnya.
- c. Observasi, untuk memahami kondisi nyata pelaksanaan program pembangunan di lapangan.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Lim, 2024). Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki fleksibilitas dalam mengeksplorasi jawaban informan, sekaligus tetap menjaga fokus pada tujuan penelitian.

Studi dokumentasi digunakan untuk menilai konsistensi antara dokumen perencanaan dan implementasi kebijakan, serta untuk mengidentifikasi indikator kinerja dan prioritas pembangunan daerah. Sementara itu, observasi lapangan memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana program pembangunan benar-benar dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat.

Kombinasi ketiga teknik ini juga berfungsi sebagai bentuk triangulasi metode, sehingga hasil penelitian tidak hanya bergantung pada satu sumber data saja, melainkan saling melengkapi dan menguatkan.

2.6. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif dari Matthew B Miles, A Michael Huberman, dan Johnny Saldana (2018), yang meliputi:

- a. Reduksi data, yaitu pemilahan data sesuai fokus penelitian.
- b. Penyajian data, dalam bentuk narasi dan matriks analisis kebijakan.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, untuk mengidentifikasi pola hubungan antara perencanaan dan kesejahteraan masyarakat.

Model analisis interaktif ini dilakukan secara siklus dan berulang, di mana proses pengumpulan data, analisis, dan interpretasi berlangsung secara simultan. Reduksi data tidak hanya berupa penyederhanaan, tetapi juga proses seleksi, kategorisasi, dan pengkodean data untuk menemukan tema-tema utama.

Penyajian data dalam bentuk matriks analisis kebijakan membantu peneliti melihat keterkaitan antara variabel, seperti hubungan antara tujuan, program, dan hasil pembangunan. Sementara itu, proses penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan terus melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh di lapangan.

Selain itu, analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk mengevaluasi kualitas dokumen RPJMD secara sistematis (Krippendorff, 2018). Teknik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, konsistensi, serta kesesuaian antara perencanaan dan prinsip-prinsip kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

2.7. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data diuji melalui:

- a. Triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.
- b. Member check, yaitu mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan keakuratan data.
- c. Audit trail, untuk menjaga transparansi proses penelitian (Lincoln & Denzin, 2018).

Langkah-langkah ini penting untuk memastikan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian kualitatif (Creswell & Creswell, 2022; Nowell et al., 2017). Triangulasi tidak hanya meningkatkan validitas, tetapi juga membantu mengurangi bias subjektivitas peneliti.

Member check dilakukan dengan memberikan ringkasan hasil wawancara kepada informan agar mereka dapat memverifikasi atau mengoreksi informasi yang disampaikan. Hal ini penting untuk menjaga akurasi interpretasi data.

Sementara itu, *audit trail* dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari pengumpulan data, proses analisis, hingga penarikan kesimpulan. Dokumentasi ini memungkinkan penelitian untuk ditelusuri ulang (*traceable*) dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas ilmiah.

Dengan penerapan uji keabsahan ini, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kepercayaan (*trustworthiness*) yang tinggi, baik dari aspek kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Kualitas Dokumen RPJMD Kota Parepare

Hasil analisis terhadap dokumen RPJMD Kota Parepare menunjukkan bahwa secara umum struktur perencanaan telah memenuhi kaidah formal sebagaimana diatur dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Visi dan misi pembangunan daerah dirumuskan secara normatif dengan menekankan pada peningkatan daya saing daerah, kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif dan normatif, dokumen RPJMD telah sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku, seperti pendekatan top-down planning yang mengacu pada kebijakan nasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa aspek kepatuhan terhadap regulasi perencanaan telah terpenuhi dengan baik, sehingga secara formal dokumen RPJMD memiliki legitimasi sebagai instrumen utama pembangunan daerah.

Namun demikian, ditemukan bahwa terdapat beberapa kelemahan pada aspek operasionalisasi tujuan dan sasaran. Indikator kinerja yang digunakan dalam RPJMD masih cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Hal ini berdampak pada kesulitan dalam mengukur capaian kinerja secara akurat dan objektif. Dalam konteks manajemen kinerja sektor publik, indikator yang tidak terukur dengan baik akan menyebabkan evaluasi kebijakan menjadi kurang berbasis bukti (*evidence-based evaluation*) dan lebih bersifat administratif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses perumusan indikator belum sepenuhnya berbasis pada analisis kebutuhan yang mendalam serta belum didukung oleh data empiris yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan bias dalam evaluasi kinerja serta mengurangi akuntabilitas pemerintah daerah.

Selain itu, konsistensi antara tujuan, sasaran, dan program pembangunan belum sepenuhnya terjaga. Beberapa program yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan belum secara langsung mencerminkan prioritas strategis yang telah ditetapkan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini sering disebut sebagai *policy incoherence*, yaitu ketidaksesuaian antara level perencanaan strategis dan implementasi teknis. Kesenjangan ini dapat menyebabkan inefisiensi dalam pelaksanaan program, duplikasi kegiatan, serta menurunkan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Lebih jauh, kondisi ini juga menunjukkan bahwa mekanisme *performance-based planning* belum berjalan secara optimal.

Secara lebih luas, lemahnya konsistensi tersebut juga mengindikasikan bahwa proses perencanaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip *integrative planning*, yaitu keterpaduan antara perencanaan sektoral dan lintas sektor. Dalam praktik ideal, setiap program pembangunan seharusnya merupakan turunan langsung dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, sehingga terdapat garis hubungan yang jelas antara perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Ketika keterpaduan ini tidak terbangun secara kuat, maka perencanaan cenderung menjadi kumpulan program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri tanpa arah sinergis yang jelas.

Dari sisi kelembagaan, kondisi ini juga dapat mencerminkan adanya keterbatasan kapasitas analitis aparatur dalam menerjemahkan visi pembangunan ke dalam indikator operasional yang terukur. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa perencanaan masih sangat bergantung pada pendekatan administratif dibandingkan pendekatan analitis berbasis data. Dalam konteks tata kelola modern, hal ini menjadi tantangan serius karena menuntut adanya peningkatan kapasitas teknokratis aparatur dalam menyusun kebijakan yang berbasis bukti dan hasil.

Secara teoretis, kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas perencanaan belum sepenuhnya berbasis evidence-based policy sebagaimana direkomendasikan oleh OECD (2019) dan World Bank (2020). Perencanaan yang belum didukung oleh indikator yang kuat berpotensi menurunkan efektivitas implementasi kebijakan, karena keputusan yang diambil tidak sepenuhnya didasarkan pada bukti empiris yang terukur. Dalam literatur pembangunan modern, perencanaan berbasis bukti dipandang sebagai elemen penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (good governance), terutama dalam memastikan efisiensi alokasi sumber daya publik serta peningkatan akuntabilitas.

Selain itu, lemahnya integrasi antara data, indikator, dan program juga menunjukkan bahwa sistem perencanaan masih belum sepenuhnya adaptif terhadap pendekatan results-based planning. Padahal, pendekatan ini menekankan pentingnya keterkaitan yang jelas antara input, output, outcome, hingga impact dalam setiap kebijakan pembangunan. Tanpa keterkaitan tersebut, proses evaluasi pembangunan akan sulit mengukur sejauh mana intervensi pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh, kondisi ini juga menunjukkan bahwa sistem monitoring dan evaluasi (monev) belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembelajaran kebijakan (policy learning). Idealnya, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan pada periode berikutnya, sehingga tercipta siklus kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Namun, ketika indikator tidak jelas dan data tidak terintegrasi, maka fungsi evaluasi menjadi terbatas pada pelaporan administratif semata.

Dengan kata lain, tanpa dukungan data yang valid, indikator yang terukur, konsistensi antar level perencanaan, serta sistem evaluasi yang kuat, kebijakan pembangunan cenderung bersifat normatif dan kurang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem perencanaan berbasis data, integrasi sistem informasi pembangunan daerah, serta peningkatan kapasitas analitis aparatur menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas RPJMD sebagai instrumen utama pembangunan daerah.

3.2. Proses Penyusunan RPJMD dan Partisipasi Pemangku Kepentingan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses penyusunan RPJMD telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam proses ini. Hal ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip partisipatif dalam perencanaan pembangunan, yang secara normatif sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam konteks desentralisasi, mekanisme ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan tidak semata-mata bersifat top-down.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya substantif. Sebagian informan menyatakan bahwa aspirasi masyarakat belum seluruhnya terakomodasi dalam dokumen akhir RPJMD. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam proses Musrenbang, rendahnya kapasitas teknis sebagian peserta, serta dominasi aktor pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi masih bersifat simbolik (tokenism), di mana masyarakat memang dilibatkan dalam proses, tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil akhir kebijakan. Akibatnya, ruang deliberasi publik menjadi terbatas dan lebih bersifat seremonial dibandingkan sebagai ruang pengambilan keputusan yang inklusif.

Dalam perspektif teori partisipasi publik, kondisi ini menunjukkan bahwa proses perencanaan masih berada pada tahap consultative participation, belum mencapai tingkat collaborative governance atau co-production yang ideal. Pada tahap konsultatif, masyarakat hanya diminta memberikan masukan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah. Sementara itu, collaborative governance menuntut adanya pembagian peran yang lebih setara antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Padahal, partisipasi yang bermakna (meaningful participation) sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan masyarakat secara nyata. Ketika partisipasi hanya bersifat formalitas, maka terdapat risiko bahwa kebijakan yang dihasilkan kurang kontekstual, tidak responsif, dan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang beragam, terutama kelompok rentan.

Lebih jauh, keterbatasan partisipasi substantif juga dapat berdampak pada rendahnya legitimasi kebijakan publik. Dalam literatur kebijakan publik modern, legitimasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aspek legal-formal, tetapi juga oleh sejauh mana proses penyusunannya melibatkan masyarakat secara inklusif dan deliberatif. Ketika masyarakat merasa tidak memiliki pengaruh nyata dalam proses perencanaan, maka tingkat kepatuhan dan dukungan terhadap program pembangunan juga dapat menurun. Hal ini pada akhirnya dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Selain aspek partisipasi, penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi lintas sektor masih menghadapi kendala, terutama dalam sinkronisasi program antar OPD. Beberapa program masih berjalan secara sektoral tanpa integrasi yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi kegiatan, inefisiensi anggaran, serta fragmentasi kebijakan. Kurangnya integrasi ini juga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang bersifat multidimensional, karena permasalahan pembangunan daerah pada dasarnya saling berkaitan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang tidak dapat diselesaikan secara parsial.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme inter-agency coordination belum berjalan secara optimal. Padahal, dalam sistem perencanaan pembangunan modern, integrasi lintas sektor merupakan elemen penting untuk memastikan konsistensi kebijakan dan efektivitas implementasi program. Tanpa koordinasi yang kuat, setiap OPD cenderung bekerja secara parsial sesuai dengan agenda sektoral masing-masing, sehingga mengurangi efektivitas perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Kondisi ini juga menunjukkan masih lemahnya integrative governance dalam perencanaan pembangunan daerah.

Temuan ini sejalan dengan Rodríguez-Pose dan Wilkie (2019) yang menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Kualitas institusi, termasuk kemampuan koordinasi antar lembaga, menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif dan terintegrasi. Dengan demikian, penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan mekanisme kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, diperlukan pula inovasi dalam mekanisme partisipasi publik, misalnya melalui digital participatory planning atau pemanfaatan teknologi informasi dalam Musrenbang agar jangkauan partisipasi lebih luas dan tidak hanya terbatas pada forum formal. Pendekatan ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat yang lebih beragam, termasuk kelompok muda dan masyarakat yang sulit mengakses forum tatap muka.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural aspek partisipasi telah dilaksanakan, namun secara substantif masih diperlukan penguatan agar proses perencanaan benar-benar bersifat inklusif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tanpa penguatan tersebut, perencanaan pembangunan berisiko tetap didominasi oleh aktor birokrasi dan kurang mencerminkan aspirasi publik secara utuh.

3.3. Kesesuaian antara Perencanaan dan Implementasi

Analisis menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara rencana yang tertuang dalam RPJMD dengan implementasi di lapangan. Beberapa program prioritas tidak terlaksana secara optimal akibat keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan nasional, serta kendala administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pembangunan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, tetapi juga sangat ditentukan oleh dinamika lingkungan eksternal dan kapasitas internal pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Dalam konteks kebijakan publik, situasi ini sering dikaitkan dengan implementation gap, yaitu kesenjangan antara formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional. Kesenjangan ini menjadi salah satu tantangan klasik dalam tata kelola pembangunan, terutama pada sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada daerah namun belum selalu diiringi dengan kapasitas implementasi yang memadai.

Selain itu, terdapat fenomena program shifting, yaitu perubahan prioritas program selama periode implementasi yang tidak sepenuhnya mengacu pada dokumen perencanaan awal. Fenomena ini menunjukkan bahwa RPJMD belum sepenuhnya menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam praktiknya, perubahan prioritas ini sering terjadi sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi fiskal yang fluktuatif, perubahan kebijakan nasional, atau tekanan kebutuhan jangka pendek masyarakat. Dari perspektif manajemen publik, fleksibilitas kebijakan memang diperlukan agar pemerintah daerah dapat merespons situasi yang dinamis. Namun demikian,

jika perubahan tersebut tidak didasarkan pada mekanisme evaluasi yang sistematis dan transparan, maka hal ini dapat mengindikasikan lemahnya konsistensi kebijakan serta rendahnya komitmen terhadap rencana pembangunan jangka menengah yang telah disepakati.

Dalam perspektif tata kelola kebijakan, ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi juga mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip *results-based management*. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap program pembangunan harus memiliki keterkaitan yang jelas antara input, proses, output, outcome, hingga impact. Idealnya, RPJMD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan administratif, tetapi juga sebagai instrumen manajemen kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara objektif. Ketika keterkaitan antar tahapan tersebut tidak berjalan dengan baik, maka proses evaluasi menjadi sulit dilakukan secara terukur, dan efektivitas kebijakan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas.

Lebih lanjut, lemahnya keterhubungan antara perencanaan dan implementasi juga menunjukkan bahwa sistem perencanaan belum sepenuhnya berbasis pada *adaptive governance*. Dalam pendekatan ini, kebijakan publik seharusnya mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi, tetapi tetap berada dalam kerangka tujuan jangka menengah dan jangka panjang yang konsisten. Ketidakseimbangan antara fleksibilitas dan konsistensi inilah yang sering kali menyebabkan kebijakan berubah arah tanpa landasan evaluasi yang kuat.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa program yang berhasil diimplementasikan dengan baik umumnya didukung oleh beberapa faktor kunci, yaitu:

- a. Ketersediaan anggaran yang memadai
- b. Koordinasi antar OPD yang efektif
- c. Kepemimpinan yang kuat pada tingkat pelaksana

Ketiga faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh kapasitas manajerial dan kepemimpinan dalam mengelola sumber daya serta mengoordinasikan berbagai aktor pelaksana. Dalam konteks ini, kepemimpinan memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa visi dan tujuan pembangunan tetap terjaga meskipun terdapat dinamika, tekanan politik, maupun hambatan teknis dalam pelaksanaan program. Kepemimpinan yang efektif juga mampu menciptakan koordinasi lintas sektor yang lebih solid dan mengurangi fragmentasi kebijakan.

Selain itu, koordinasi antar OPD menjadi aspek penting dalam memastikan integrasi program pembangunan. Tanpa koordinasi yang baik, setiap OPD cenderung bekerja secara sektoral sehingga mengurangi sinergi antar program dan berpotensi menimbulkan duplikasi kegiatan, tumpang tindih program, atau inefisiensi anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik bersifat lintas sektor (*cross-sectoral*) dan membutuhkan mekanisme kolaborasi yang kuat agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Dalam praktiknya, lemahnya koordinasi juga sering disebabkan oleh perbedaan prioritas antar OPD serta belum optimalnya sistem perencanaan terpadu berbasis kinerja.

Dari perspektif teoritis, kondisi ini memperkuat pandangan World Bank (2020) bahwa keselarasan antara perencanaan dan implementasi merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan. Perencanaan yang baik tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak diikuti oleh implementasi yang konsisten, terkoordinasi, dan didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Dengan kata lain, kualitas perencanaan dan kualitas implementasi merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Lebih jauh, ketidaksesuaian ini juga menunjukkan pentingnya penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis outcome dan impact, bukan hanya output. Sistem monitoring yang hanya berfokus pada output cenderung tidak mampu menangkap perubahan nyata yang terjadi di masyarakat. Sebaliknya, pendekatan berbasis outcome memungkinkan pemerintah daerah untuk menilai sejauh mana program benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem evaluasi yang kuat, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi deviasi implementasi lebih dini dan melakukan penyesuaian kebijakan secara tepat waktu.

Selain itu, diperlukan pula penguatan mekanisme *feedback loop* antara hasil evaluasi dan proses perencanaan ulang. Hal ini penting agar RPJMD tidak hanya menjadi dokumen statis lima tahunan, tetapi juga menjadi

instrumen dinamis yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi tanpa mengabaikan arah pembangunan jangka panjang.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa kesesuaian antara perencanaan dan implementasi merupakan elemen krusial dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Tanpa adanya keselarasan tersebut, perencanaan yang baik sekalipun tidak akan mampu menghasilkan dampak pembangunan yang optimal, efektif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

3.4. Dampak Perencanaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan data indikator kesejahteraan masyarakat, Kota Parepare menunjukkan tren yang relatif positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan tingkat kemiskinan, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RPJMD telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam perspektif pembangunan, indikator-indikator tersebut merepresentasikan dimensi dasar kesejahteraan yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Peningkatan IPM mengindikasikan adanya perbaikan dalam kualitas sumber daya manusia, yang merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan adanya efektivitas intervensi kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah daerah dalam meningkatkan daya beli serta mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat. Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan juga mencerminkan adanya perluasan jangkauan pelayanan publik yang lebih inklusif.

Namun demikian, meskipun secara agregat menunjukkan tren yang positif, peningkatan tersebut belum sepenuhnya merata. Ketimpangan antar kelompok masyarakat masih terlihat, terutama dalam akses terhadap peluang ekonomi, kualitas layanan publik, serta distribusi manfaat pembangunan antar wilayah. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan masih cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif. Dalam konteks pembangunan daerah, kondisi ini menunjukkan adanya *development gap* yang perlu mendapat perhatian serius dalam proses perencanaan kebijakan selanjutnya.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masyarakat memang merasakan manfaat pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan layanan administrasi. Akan tetapi, terdapat sejumlah kritik yang muncul dari masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan. Kritik tersebut antara lain mencakup ketidaksesuaian program dengan kebutuhan lokal, kurangnya keberlanjutan program pembangunan, serta minimnya evaluasi berbasis dampak (*impact evaluation*). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian program pembangunan masih lebih berorientasi pada pencapaian output fisik dibandingkan outcome atau dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kesenjangan antara output dan outcome tersebut mengindikasikan adanya masalah dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan. Dalam banyak kasus, keberhasilan pembangunan masih diukur dari capaian administratif atau fisik, bukan dari sejauh mana program tersebut benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (*results-oriented development*).

Lebih lanjut, meskipun perencanaan pembangunan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, efektivitasnya masih belum optimal. Dengan kata lain, pembangunan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil jangka panjang dan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan dalam sistem perencanaan, terutama dalam hal integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbasis dampak.

Dalam perspektif teori pembangunan inklusif, kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Kota Parepare belum sepenuhnya mencapai prinsip *inclusive development*, yaitu pembangunan yang memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat merasakan manfaat secara adil dan merata (UNDP, 2022). Pembangunan inklusif tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan akses, kesempatan, dan hasil pembangunan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis keadilan sosial dalam perencanaan pembangunan daerah. Penguatan mekanisme evaluasi berbasis dampak, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, serta penajaman fokus program terhadap kelompok rentan menjadi hal penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berhasil secara statistik, tetapi juga bermakna secara sosial.

3.5. Diskusi: Implikasi Teoretis dan Praktis

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah memiliki hubungan yang signifikan dengan capaian kesejahteraan masyarakat, namun hubungan tersebut bersifat tidak langsung dan dipengaruhi oleh berbagai faktor intervening. Faktor-faktor intervening tersebut meliputi kapasitas kelembagaan, kualitas implementasi, koordinasi antar sektor, serta dinamika kebijakan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan tidak dapat dipandang sebagai variabel tunggal yang menentukan keberhasilan pembangunan, melainkan sebagai bagian dari sistem tata kelola yang kompleks dan saling berinteraksi. Dalam konteks ini, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sejauh mana seluruh elemen sistem perencanaan dan implementasi dapat berjalan secara sinergis.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa:

- a. Perencanaan yang baik tidak cukup tanpa implementasi yang konsisten
- b. Kapasitas kelembagaan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan
- c. Partisipasi masyarakat yang substantif meningkatkan kualitas kebijakan

Ketiga poin tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dipahami dalam kerangka *policy cycle* yang utuh, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi. Perencanaan yang baik pada tahap formulasi tidak akan menghasilkan dampak optimal apabila tidak didukung oleh implementasi yang konsisten dan terkoordinasi. Selain itu, kapasitas kelembagaan menjadi elemen fundamental dalam memastikan bahwa kebijakan dapat dijalankan secara efektif, terutama dalam konteks desentralisasi di mana kewenangan daerah semakin luas. Partisipasi masyarakat yang substantif juga menjadi faktor penting karena dapat meningkatkan legitimasi, relevansi, dan kualitas kebijakan publik.

Lebih jauh, temuan ini juga mengindikasikan pentingnya pendekatan *holistic governance* dalam perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan ini menekankan integrasi antara aktor, institusi, dan proses dalam satu sistem yang saling mendukung. Tanpa integrasi tersebut, kebijakan pembangunan cenderung bersifat parsial dan kurang efektif dalam menjawab kompleksitas permasalahan daerah.

Secara praktis, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari penelitian ini:

- a. Penguatan kualitas RPJMD, khususnya dalam perumusan indikator kinerja yang terukur dan berbasis data empiris
- b. Peningkatan kapasitas aparatur, terutama dalam analisis kebijakan, perencanaan berbasis bukti, dan pengelolaan program pembangunan
- c. Optimalisasi partisipasi masyarakat, tidak hanya formal tetapi juga substantif melalui mekanisme deliberatif yang lebih inklusif
- d. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi, berbasis outcome dan dampak untuk memastikan efektivitas kebijakan

Keempat implikasi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada dokumen perencanaan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya untuk menciptakan sinergi pembangunan yang lebih efektif.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan di Kota Parepare perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih integratif, adaptif, dan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan ini juga perlu didukung oleh inovasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas pemerintah daerah terhadap dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kota Parepare yang tertuang dalam dokumen RPJMD secara umum telah memenuhi aspek formal dan prosedural sesuai dengan ketentuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara normatif, dokumen telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta program pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Namun demikian, secara substantif masih ditemukan sejumlah kelemahan yang cukup signifikan, terutama pada aspek operasionalisasi kebijakan, penyusunan indikator kinerja, serta konsistensi antara perencanaan strategis dan implementasi program pembangunan. Indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART menunjukkan bahwa perencanaan belum sepenuhnya berbasis data yang kuat dan terukur, sehingga berpotensi mengurangi objektivitas dalam proses evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dari sisi proses penyusunan, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah dilaksanakan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta masyarakat. Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih berada pada tahap konsultatif dan belum sepenuhnya substantif. Aspirasi masyarakat belum seluruhnya terakomodasi dalam dokumen akhir RPJMD, yang mengindikasikan bahwa proses partisipasi masih bersifat formalitas atau simbolik. Selain itu, adanya dominasi aktor pemerintah dalam pengambilan keputusan serta keterbatasan kapasitas teknis masyarakat memperkuat ketimpangan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Pada aspek implementasi, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan yang cukup nyata antara rencana pembangunan dan pelaksanaannya di lapangan. Beberapa program prioritas tidak dapat direalisasikan secara optimal akibat keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan nasional, serta hambatan administratif. Fenomena *program shifting* yang terjadi selama periode implementasi menunjukkan bahwa RPJMD belum sepenuhnya menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kondisi ini mengindikasikan adanya *implementation gap* yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan, serta faktor eksternal seperti dinamika kebijakan dan kondisi fiskal daerah. Meskipun demikian, pembangunan di Kota Parepare tetap menunjukkan capaian yang relatif positif, yang tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan tingkat kemiskinan, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, manfaat pembangunan tersebut belum sepenuhnya merata. Ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi dan kualitas layanan publik masih ditemukan di berbagai kelompok masyarakat, yang menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya bersifat inklusif. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara kualitas perencanaan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat bersifat tidak langsung dan dipengaruhi oleh berbagai faktor intervening, seperti kapasitas kelembagaan, efektivitas implementasi, kualitas koordinasi antar sektor, serta tingkat partisipasi masyarakat. Dengan demikian, perencanaan pembangunan tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor penentu keberhasilan pembangunan, melainkan sebagai bagian dari sistem tata kelola yang lebih luas dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam beberapa aspek utama, yaitu peningkatan kualitas penyusunan indikator kinerja yang lebih terukur dan berbasis data, penguatan kapasitas aparat dalam analisis kebijakan dan perencanaan berbasis bukti, optimalisasi partisipasi masyarakat yang lebih substantif, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome dan dampak. Selain itu, integrasi antar sektor dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan. Dengan pendekatan yang lebih integratif, adaptif, dan berbasis data, perencanaan pembangunan di Kota Parepare diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga mampu mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Referensi

1. Asian Development Bank. (2022). *Asian development outlook 2022*. ADB.
2. Bappenas. (2021). *Pedoman penyusunan RPJMD*. Kementerian PPN/Bappenas.
3. Barca, F., McCann, P., & Rodríguez-Pose, A. (2019). The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches. *Journal of Regional Science*, 59(1), 134–152.
4. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
5. Etikan, I., & Bala, K. (2017). Sampling and sampling methods. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 5(6).
6. Howlett, M., & Mukherjee, I. (2018). *Theories of the policy process*. Routledge.
7. Imanina, K. (2024). Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. *Jurnal AUDI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak*.
8. Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
9. Lim, W. M. (2024). What is qualitative research? *Australasian Marketing Journal*, 33(2).
10. Lincoln, Y. S., & Denzin, N. K. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research*. Sage Publications.

11. Malahati, F., Ultavia, A., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348.
12. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
13. Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1).
14. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *Making decentralisation work: A handbook for policy makers*. OECD Publishing.
15. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). *Regional development policy papers*. OECD Publishing.
16. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Multi-level governance studies*. OECD Publishing.
17. Rodríguez-Pose, A., & Wilkie, C. (2019a). Institutions and the uneven development of regions. *Regional Studies*, 53(5), 1–12.
17. Rodríguez-Pose, A., & Wilkie, C. (2019b). Strategies of local economic development. *World Development*, 118, 24–37.
18. Septiana, N. N., Khoiriyah, Z., & Shaleh, S. (2024). Metode penelitian studi kasus dalam pendekatan kualitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD*.
19. Siregar, A. Y., & Murhayati, S. (2024). Metodologi studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45305–45314.
20. United Nations. (2021). *World public sector report 2021: Rebuilding better after COVID-19*. United Nations.
21. United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Human development report 2022: Uncertain times, unsettled lives*. UNDP.
22. United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Human development report 2023*. UNDP.
23. World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. World Bank.
24. World Bank. (2021). *Indonesia economic prospects*. World Bank.
25. World Bank. (2023). *World development indicators*. World Bank.